

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) dari minggu pertama Juli hingga minggu keempat September 2025, terlihat adanya fluktuasi harga yang cukup dinamis. Pada bulan Juli hingga pertengahan Agustus, IPH menunjukkan tren kenaikan berturut-turut dengan komoditas penyumbang utama antara lain beras, bawang merah, daging sapi, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Pada bulan Agustus 2025, komoditas beras mengalami tekanan harga dengan nilai IPH sebesar 0,1572 pada minggu ke-2 dan ke-3, serta 0,1295 pada minggu ke-4. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan dan gangguan pasokan antar daerah pasca musim panen, sehingga menimbulkan tekanan harga di tingkat konsumen.

Kenaikan harga beras tersebut menjadi perhatian Pemerintah Pusat, di mana Kementerian Dalam Negeri memberikan atensi pada tanggal 4 September 2025 untuk segera melakukan langkah pengendalian harga beras. Menindaklanjuti arahan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Asistensi pada tanggal 9 September 2025 dan menyepakati pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Operasi Pasar Murah (OPM) di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pasca intervensi tersebut, harga beras menunjukkan penurunan signifikan. Berdasarkan IPH, kontribusi harga beras tercatat menurun menjadi -0,1543 pada minggu ke-1, -0,1749 pada minggu ke-3, dan -0,204 pada minggu ke-4 bulan September 2025. Tren ini menggambarkan efektivitas kebijakan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Risiko ke depan yang perlu diwaspadai adalah potensi gangguan pasokan antar daerah dan dampak musim hujan terhadap komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai, yang dapat menimbulkan tekanan inflasi baru apabila tidak diantisipasi dengan baik.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Keterbatasan stok beras premium di pasaran pada awal bulan Agustus 2025 yang memicu kenaikan harga beras dan berdampak pada peningkatan IPH daerah.

Keterlambatan pelaporan Waspada Inflasi (WasInflasi) ke Pemerintah Pusat, sehingga respon dan arahan kebijakan membutuhkan waktu lebih lama untuk ditindaklanjuti di tingkat daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai tindak lanjut atas atensi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 September 2025 terkait kenaikan harga beras, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan beberapa kebijakan strategis, yaitu:

1. Rapat Asistensi TPID pada tanggal 9 September 2025 untuk membahas langkah-langkah pengendalian harga beras serta menyepakati pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pasar Pendopo pada tanggal 10 sampai dengan 13 September 2025,

2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sembilan kecamatan se-Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Bulog, Polres Barito Utara dan Kodim 1013/Muara Teweh, mulai tanggal 4 Agustus 2025 hingga 8 Oktober 2025.

3. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Perusahaan Daerah Batara Membangun pada tanggal 15 September 2025, yang menyediakan paket sembako terjangkau bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Pj. Bupati Barito Utara, Anggota TPID, serta unsur Forkopimda dan instansi teknis terkait, sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok di wilayah Kabupaten Barito Utara.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan GPM, Operasi Pasar dan Operasi Pasar Murah harga beras dan nilai IPH menunjukkan penurunan signifikan mulai minggu pertama September 2025. Kebijakan yang diambil terbukti efektif dalam menahan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Kolaborasi lintas instansi TPID berjalan baik dan terkoordinasi,

2. Respons cepat terhadap atensi pusat berdampak langsung terhadap stabilisasi harga beras di pasar

3. Perlu peningkatan koordinasi logistik dan distribusi beras SPHP agar penurunan harga dapat dirasakan lebih merata hingga ke seluruh kecamatan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Sistem Pelaporan Harga dari Kecamatan melalui revitalisasi mekanisme pelaporan mingguan berbasis digital agar TPID dapat merespons lebih cepat.
2. Optimalisasi Produksi Lokal Komoditas Strategis seperti cabai, bawang, dan jagung untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah
3. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan kabupaten/kota penghasil komoditas utama guna menjamin kelancaran distribusi dan keterjangkauan pasokan
4. Peningkatan Intensitas Operasi Pasar dan GPM dan kegiatan pasar penyeimbang menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru menjelang akhir tahun sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga akibat musim penghujan dan tingginya permintaan.